

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan salah satunya melalui pembangunan ekonomi. Pemerintah sebagai aparatur negara bertugas untuk mewujudkan pembangunan ekonomi agar kesejahteraan rakyat tercapai. Pemerintah dikatakan berhasil apabila mampu menanggulangi masalah dalam negara, tidak terkecuali masalah dalam bidang perekonomian. Banyak hal yang harus diperhatikan pemerintah dalam menangani masalah ekonomi meliputi: pertumbuhan ekonomi, pengangguran, inflasi, dan lain sebagainya. Masalah dalam bidang ekonomi harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah karena masing-masing item dalam perekonomian saling berpengaruh satu sama lain. Ditambah lagi dengan struktur perekonomian yang cenderung mengalami goncangan benar-benar seakan menuntut pemerintah untuk tidak memandang sebelah mata masalah dalam bidang ekonomi.

Perekonomian yang stabil merupakan keinginan masyarakat pada umumnya. Dalam pandangan ekonomi makro, salah satu indikator untuk melihat stabilnya perekonomian suatu negara dapat dilihat dari tingkat inflasinya. Stabilitas ekonomi diperlukan agar dapat menjaga pendapatan masyarakat dan tidak tergerus oleh kenaikan harga (inflasi) ,dengan begitu masyarakat akan menjadi lebih makmur (Boediono, 2010). Tinggi rendahnya inflasi merupakan cerminan dari sehat atau tidaknya perekonomian suatu negara. Inflasi sendiri merupakan suatu kejadian yang menunjukkan kenaikan harga secara umum dan berlangsung secara terus menerus (Murni, 2006).

Terdapat beberapa faktor penyebab tingginya inflasi di suatu negara. Samuelson dan Nordhaus dalam Pratiwi (2013:5) mengungkapkan bahwa salah satu faktor penting penyebab terjadinya inflasi disebabkan oleh pertumbuhan volume jumlah uang beredar yang cepat. Terjadinya hal ini disebabkan karena adanya peningkatan pendapatan masyarakat kemudian diiringi oleh kenaikan permintaan agregat namun *output* yang diproduksi tetap atau tidak meningkat maka harga-harga umum akan naik. Fluktuasi inflasi pada dasarnya juga memberikan dampak positif dalam perekonomian yaitu memancing daya beli masyarakat, namun jika inflasi naik secara terus menerus maka itulah yang menjadi kekhawatiran bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan tetap karena inflasi menurunkan nilai mata uang riil dalam suatu perekonomian. Inflasi juga dapat memperlebar kesenjangan pendapatan antara si kaya dan si miskin. Selain itu inflasi yang bergejolak dari waktu ke waktu juga akan berakibat terhadap neraca perdagangan, tingkat bunga, tabungan domestik, dan sebagainya.

Adapun dampak inflasi terhadap ekonomi secara makro ialah pertama inflasi domestik yang tinggi menyebabkan tingkat balas jasa yang riil terhadap asset finansial domestik semakin rendah, sehingga dapat mengganggu mobilisasi dana domestik dan bahkan dapat mengurangi tabungan domestik yang merupakan sumber dana investasi. Kedua, dapat menyebabkan daya saing ekspor berkurang dan dapat menimbulkan defisit dalam transaksi berjalan sekaligus meningkatkan hutang luar negeri. Ketiga, inflasi dapat memperburuk distribusi pendapatan dengan terjadinya transfer sumber daya dari konsumen dan golongan berpenghasilan tetap kepada produsen. Keempat inflasi yang tinggi dapat mendorong terjadinya *capital*

outflow yaitu pelarian modal keluar negeri. Kelima, tingginya inflasi menyebabkan kenaikan tingkat bunga nominal yang akan berimbas kepada investasi untuk memacu tingkat pertumbuhan perekonomian tertentu (Hera Susanti, et all 1995)

Prospek pembangunan ekonomi jangka panjang akan menjadi semakin tidak baik atau semakin memburuk jika inflasi tidak dapat dikendalikan. Dan inflasi akan cenderung akan menjadi bertambah cepat apabila tidak segera diatasi. Inflasi yang bertambah serius cenderung mengurangi investasi yang produktif, mengurangi ekspor dan menaikkan impor. Dan kecenderungan akan memperlambat pertumbuhan ekonomi (Sukirno,1997:16)

Hatta (2008) mengungkapkan secara empiris pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari krisis tahun (1997-1998) yang menyebabkan terganggunya sektor riil. Pengalaman krisis 1997-1998 atau yang lebih dikenal dengan krisis moneter memberikan trauma mendalam bagi rakyat indonesia. Dimana pada masa itu rupiah terdepresiasi atas dollar, inflasi melambung bebas mencapai 77%,sehingga nilai mata uang riill turun drastis dan menyebabkan berkurangnya kepercayaan masyarakat akan rupiah.

Tabel 1.1
Persentase Inflasi di Indonesia
Tahun 2012 – 2018

Tahun	Inflasi (%)
2012	4.30
2013	8.38
2014	8.36
2015	3.35
2016	3.02
2017	3.61
2018	3.13

Sumber: BPS 2018

Berdasarkan data tabel 1.1 pasca krisis moneter 1997-1998, perekonomian Indonesia kembali digoncang pada tahun 2008 dimana inflasi Indonesia kembali merangkak hingga angka 11.06 %. Berbeda dengan krisis tahun 1997-1998 , krisis 2008 disebabkan oleh faktor eksternal yaitu *suprime mortgage* yang terjadi di Amerika Serikat kemudian yang berimbas pada perekonomian negara-negara lain termasuk Indonesia. Meskipun sering mengalami gejolak dari tahun ke tahun sampai saat ini perkembangan inflasi Indonesia masih terkendali yaitu 3.13%. Seperti yang kita ketahui bahwasanya inflasi di Indonesia sangat sensitif dan mudah sekali naik. Inflasi sudah seperti penyakit yang telah mendarah daging bagi negara berkembang seperti Indonesia.

Jika inflasi yang tinggi dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap perekonomian begitupun sebaliknya. Inflasi yang rendah juga berdampak kepada kelesuan perekonomian suatu negara. Tingkat harga yang rendah tidak memberikan rangsangan kepada sektor riil untuk melakukan kegiatan produksi. Karena dianggap tidak akan dapat menutupi biaya produksi serta tidak memberikan keuntungan yang diinginkan perusahaan. Inflasi yang tidak stabil memberikan ketidakpastian terhadap pelaku ekonomi dalam mengambil

keputusan terutama dalam menentukan harga. Laju inflasi suatu negara biasanya ditargetkan dibawah dua digit.

Berbagai kebijakan dilakukan oleh pemerintah dalam mencapai ekonomi yang kembali stabil. Mulai dari kebijakan moneter hingga kebijakan fiskal. Menurut Sukirno (1985) kebijakan moneter adalah kebijaksanaan yang bersifat makroekonomi oleh bank sentral bertujuan untuk mempengaruhi tingkat kegiatan ekonomi dengan mengawasi jumlah uang beredar (JUB), dan tingkat suku bunga. Bank Indonesia selaku pemegang kendali atas otoritas moneter memiliki tujuan utama mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yaitu kestabilan harga (inflasi) dan nilai tukar rupiah.

Menurut Pohan (2008) menjaga kestabilan uang bukanlah masalah yang sederhana. Karena uang berkaitan erat dengan hampir seluruh aspek dalam perekonomian. Adapun instrumen moneter dalam mengawasi jumlah uang beredar ialah. Pertama politik pasar terbuka, dimana bank indonesia menjual atau membeli surat berharga kepada masyarakat. Kedua, politik diskonto yaitu bank sentral mengubah besaran tingkat suku bunga yang harus disetor oleh bank umum. Ketiga, politik cadangan minimum ialah pembatasan pemberian kredit kepada nasabah. Keempat, moral suasion merupakan himbauan moral kepada masyarakat. Keempat instrumen tersebut berguna untuk mengendalikan dalam hal menambah atau mengurangi jumlah uang beredar yang berada pada masyarakat agar tidak terjadinya inflasi maupun deflasi. Deflasi juga tidak baik untuk perekonomian. Jika hal tersebut terjadi maka pemerintah dan bank sentral akan mengambil tindakan seperti menurunkan tingkat suku bunga, agar masyarakat tidak melakukan penundaan pembelian akan suatu barang atau jasa.

Tabel 1.2
Perkembangan Jumlah Uang Beredar (M_1) di Indonesia
Tahun 2012-2018

Tahun	Jumlah Uang Beredar (M_1) (Milyar)
2012	841722
2013	858557
2014	942221
2015	1055440
2016	1237643
2017	1390807
2018	1457150

Sumber : Bank Indonesia 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah uang beredar di Indonesia (M_1) cenderung meningkat dari tahun ke tahun, yang berarti terjadi semakin tinggi permintaan uang di masyarakat.

Meredam laju inflasi melalui penstabilan jumlah uang beredar selalu berkaitan dengan suku bunga SBI. Karena tinggi rendahnya tingkat suku bunga SBI dapat mempengaruhi jumlah uang beredar yang ada pada masyarakat. Tingkat suku bunga memberi sumbangsih besar terhadap perekonomian. Banyak bank pemerintah ataupun bank swasta berlomba-lomba untuk menaikkan tingkat suku bunga guna menarik masyarakat untuk menabung.

Tabel 1.3
Perkembangan Suku Bunga SBI di Indonesia
Tahun 2012-2018

Tahun	Suku Bunga SBI (persen)
2012	4,80
2013	7,22
2014	6,90
2015	7,10
2016	5,90
2017	4,25
2018	6,00

Sumber :Bank Indonesia 2018

Pada data diatas nilai suku bunga mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Terlihat selama tujuh tahun terakhir suku bunga SBI paling tinggi pada tahun 2013 sebesar 7,22 persen. Dan paling rendah pada tahun 4,25 persen pada tahun 2017. Suku bunga yang terlalu tinggi berkemungkinan investor tidak melakukan investasi karena biaya kredit yang dikeluarkan terlalu tinggi sedangkan tingkat suku bunga yang terlalu rendah tidak mendorong masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank karena dianggap tidak menguntungkan. Kemudian, jika tingkat suku bunga dalam negeri terlalu rendah hal tersebut akan berpotensi mengalirnya modal keluar negri. Dimana masyarakat akan memilih menyimpan uangnya di luar negri yang mana tingkat bunga tabungannya dianggap lebih tinggi dan lebih menguntungkan.

Faktor lain yang mempengaruhi infasi ialah nilai tukar rupiah. Tidak stabilnya nilai tukar rupiah akan mempengaruhi arus modal, investasi serta perdagangan internasional. Ketidakstabilan nilai tukar rupiah berdampak kepada melonjaknya biaya produksi sehingga menyebabkan harga-harga juga akan naik. Sejak 14 Agustus 1997 Indonesia menganut sistem nilai tukar mengambang bebas (*free floating exchange rate*) yang artinya nilai tukar sepenuhnya ditentukan oleh mekanisme pasar tanpa ada campur tangan pemerintah. Berikut ialah perkembangan nilai tukar Rupiah atas Dollar AS.

Tabel 1.4
Perkembangan Nilai Tukar Rupiah / Dollar
Tahun 2012-2018

Tahun	Nilai Tukar Rupiah (Rp / \$)
2012	9.670
2013	12.189
2014	12.440
2015	13.795
2016	13.436
2017	13.548
2018	14.481

Sumber : Bank Indonesia, 2018

Dari data yang disajikan diatas dapat disimpulkan bahwa dari tahun ke tahun nilai tukar rupiah terhadap dollar cenderung terdepresiasi, pada tahun 2012 nilai tukar rupiah terhadap dollar ialah Rp. 9.670 dan terus menurun pada tahun berikutnya hingga tahun 2018 nilai tukar rupiah melebihi dua digit berkisar Rp. 14.481/ dollar. Terdapat banyak faktor yang menjadi penyebab merosotnya nilai rupiah akan dollar salah satunya ialah kondisi makro ekonomi suatu negara.

Disamping kebijakan moneter terdapat kebijakan fiskal yang merupakan kebijakan pemerintah dalam bidang anggaran dan belanja negara. Hal ini berarti mencakup penerimaan dan pengeluaran negara. Melalui kebijakan fiskal pemerintah meredam inflasidengan caramengurangi pengeluaran pemerintah dan menaikkan tarif pajak. Berkurangnya pengeluaran pemerintah diharapkan permintaan terhadap barang dan jasa berkurang kemudian pada akhirnya dapat menurunkan harga- harga. Terjadinya peningkatan tarif pajak secara otomatis akan mengurangi tingkat konsumsi masyarakat, sehingga saat terjadinya pengurangan pola konsumsi maka juga akan menurunkan permintaan dan akhirnya menyebabkan harga menjadi turun. Dengan demikian, kebijakan fiskal sebenarnya

merupakan kebijakan pengelolaan keuangan negara dan terbatas pada sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran negara yang tercantum dalam APBN.

Pajak merupakan peralihan kekayaan dari rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*. Pajak yang sudah di pungut akan digunakan untuk membiayai kepentingan umum, termasuk membiayai pembangunan dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan masyarakat. Semakin tinggi tarif pajak maka akan menyebabkan penurunan harga. Karena masyarakat akan mengurangi pengeluaran atau konsumsi untuk pembiayaan pajak. Dengan demikian maka inflasi akan turun.

Tabel 1.5
Data Penerimaan Pajak di Indonesia
Tahun 2012-2018

Tahun	Pajak (Milyar)
2012	1032570,2
2013	1192994,1
2014	1280389,0
2015	1379991,6
2016	1546664,6
2017	1498871,6
2018	1618095,5

Sumber. Portal data APBN Kemenkeu RI 2018

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa penerimaan negara yang berasal dari pajak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dapat dilihat bahwa penerimaan pajak tertinggi pada tahun 2018 sebesar 1618095,5 Milyar.

Kebijakan fiskal selanjutnya yang menjadi variabel dalam pengendalian inflasi setelah penerimaan pajak ialah pengeluaran pemerintah atau belanja pemerintah. Belanja pemerintah sendiri berarti setiap pembiayaan yang dikeluarkan untuk kepentingan negara contohnya pengeluaran rutin. Samuelson

dan Nordhaus (2004) berpendapat bahwa pemerintah harus mengelola pendapatan untuk membiayai barang-barang publiknya dan untuk program-program redistribusi pendapatannya. Pendapatan itu berasal dari pajak-pajak yang dikenakan atas pendapatan pribadi ataupun pendapatan perusahaan. Seluruh tingkatan pemerintah mengumpulkan pajak untuk membiayai pengeluarannya. Pengeluaran pemerintah akan menaikkan pendapatan serta meningkatkan produksi secara berganda sepanjang perekonomian belum mencapai tingkat kesempatan kerja penuh karena ia menaikkan permintaan agregat didasarkan pada anggapan bahwa pengeluaran pemerintah tidaklah pada proyek-proyek yang menghalangi atau menggantikan investasi sektor swasta. Di bawah ini ialah data belanja pemerintah Indonesia dari tahun 2012 hingga 2018.

Tabel 1.6
Data Pengeluaran Pemerintah Indonesia
Tahun 2012 - 2018

Tahun	Pengeluaran Pemerintah (Milyar)
2012	1435406,7
2013	1683011,1
2014	1842495,3
2015	2039483,6
2016	2095724,7
2017	2080451,2
2018	2220657,0

Sumber : Portal data APBN Kemenkeu RI 2018

Berdasarkan data di atas layak nya penerimaan negara, pengeluaran pemerintah juga mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dimana pada tahun 2018 tercatat pengeluaran pemerintah sebesar 2220657,0 Milyar. Pengeluaran pemerintah meliputi pengeluaran untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan sebagainya.

Jhingan, (2003) mengungkapkan dalam perekonomian negara berkembang selalu terdapat ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran dari sektor riil. Dengan bertambahnya injeksi ke dalam perekonomian, permintaan meningkat tetapi penawaran relatif tetap karena adanya kekakuan struktural, ketidaksempurnaan pasar. hal ini yang menyebabkan kenaikan harga yang inflasioner. Selain dampak pengeluaran pemerintah terhadap *output* aspek yang tidak kalah pentingnya ialah menyangkut sinkronasi kebijakan fiskal dengan siklus bisnis perekonomian yang ada di Indonesia . Pada dasarnya kebijakan fiskal memiliki sifat *automatic stabilizer* perekonomian. Artinya dalam perekonomian yang sedang mengalami ekspansi pengeluaran pemerintah harusnya berkurang dan penerimaan pajak bertambah. Begitupun sebaliknya jika perekonomian dalam keadaan kontraksi maka pengeluaran pemerintah di tingkatkan dan pajak diturunkan., dengan demikian *automatic stabilizer* kebijakan fiskal masyarakat adanya fungsi *countercyclical* dari kebijakan fiskal (Surjaningsih dkk,2012)

Pada hakikatnya baik kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal sama-sama bertujuan untuk menanggulangi inflasi agar terwujudnya perekonomian yang stabil. Namun perbedaannya terletak pada kebijakan fiskal mempengaruhi perekonomian melalui penerimaan dan pemasukan negara, pemasukan negara yang dimaksud ialah yang berasal dari pajak dan pungutan lainnya yang bersumber dari perekonomian di dalam negeri. Sedangkan kebijakan moneter lebih ditujukan agar liquiditas dalam perekonomian berada dalam jumlah yang stabil dan tepat. Dengan mengurangi atau menambah jumlah uang beredar yang berada pada masyarakat. Namun bagaimanapun kebijakan moneter dan kebijakan fiskal

tidak dapat berjalan secara individual, koordinasi antara keduanya sangat diperlukan agar tercapainya perekonomian yang diinginkan. Berdasarkan paparan dari latar belakang di atas dengan pentingnya pengendalian inflasi terdapat dua kebijakan yang perlu diterapkan agar terciptanya perekonomian yang stabil. Maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai “ Analisis Pengaruh Kebijakan Moneter Dan Fiskal Terhadap Inflasi Di Indonesia”

1.2 Rumusan Masalah

1. Seberapa besar pengaruh jumlah uang beredar terhadap inflasi di Indonesia?
2. Seberapa besar pengaruh tingkat suku bunga terhadap inflasi di Indonesia ?
3. Seberapa besar pengaruh nilai tukar terhadap inflasi di Indonesia ?
4. Seberapa besar pengaruh pajak terhadap inflasi di Indonesia ?
5. Seberapa besar pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap inflasi di Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini ialah :

1. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh jumlah uang beredar terhadap inflasi di Indonesia.
2. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh tingkat suku bunga terhadap inflasi di Indonesia.
3. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh nilai tukar terhadap inflasi di Indonesia.
4. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh pajak terhadap inflasi di Indonesia.
5. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap inflasi di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang ekonomi terutama di bidang moneter. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan referensi dibidang akademis sebagai pedoman bagi peneliti selanjutnya guna untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta juga dapat digunakan sebagai pedoman pustaka.
2. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengambil keputusan dalam menjaga kestabilan perekonomian di bidang moneter.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini ialah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab I pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang kajian teori dan landasan teori yang digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam melakukann penelitian ini. Dimana teori yang di maksud ialah teori inflasi , jumlah uang beredar, nilai tukar, suku bunga, pajak, dan pengeluaran pemerintah serta berisi tentang penelitian terdahulu dan kerangka konseptual.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang ruang lingkup penelitian, defenisi operasional variabel, jenis dan sumber data, motode pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan untuk menganalisis variabel independen terhadap variabel dependen.

BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH

Menjelaskan bagaimana tentang gambaran umum dari wilayah yang dilakukan sebagai tempat penelitian serta menjelaskan variabel apa saja yang digunakan dalam penelitian tersebut.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Membahas hasil dari sebuah penelitian yang telah dilakukan. Hasil tersebut berupa hasil olahan data dan hasil dari uji yang telah dilakukan.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Menjelaskan tentang kesimpulan dari penelitian serta saran yang diberikan setelah melakukan sebuah penelitian.